



Implementation of Agricultural Extension Policy in Rejang Lebong Regency

Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Rejang Lebong



Nedhi Hermansya^a
Rahiman Dani^b
Henny Aprianty^c

Article history:

Submitted: 29-09-2025

Revised: 30-11-2025

Accepted: 28-12-2025

Keywords:

Policy, Implementation, Agricultural Extension, Farmer Groups.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of agricultural extension policy and identify the constraints encountered in its implementation in Rejang Lebong Regency. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The informants consisted of the Head of the Agriculture and Fisheries Office of Rejang Lebong Regency, the Coordinator of the Agricultural Extension Center (BPP), Agricultural Extension Workers (PPL), and Farmer Group Leaders. Policy implementation was analyzed using Edward III's framework, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, while implementation constraints were examined using the framework of Mazmanian and Sabatier. The results indicate that the implementation of agricultural extension policy in Rejang Lebong Regency has generally been carried out effectively. Communication has been facilitated through continuous dissemination of information and assistance to farmers. Resource support is reflected in the availability of extension workers and supporting facilities, although limitations in personnel and infrastructure remain. The disposition aspect demonstrates a strong commitment among policy implementers, while the bureaucratic structure is supported by implementation guidelines and inter-agency coordination. The main constraints include the complexity of agricultural issues, limited resources, regulatory changes, and farmers' socio-economic conditions affecting the adoption of agricultural innovations. Therefore, strengthening extension workers' capacity, improving facilities and infrastructure, and enhancing institutional support are necessary to improve policy implementation effectiveness.

Keywords : Policy, Implementation, Agricultural Extension, Farmer Groups.

^a Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Indonesia

^b Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Indonesia

^c Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Indonesia

Abstrak

Kajian ini difokuskan pada penelaahan pelaksanaan kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong dengan menyoroti proses implementasi program serta berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena penelitian melalui pengumpulan informasi dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan telaah dokumen yang relevan. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan Ketua Kelompok Tani. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan analisis kendala menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong telah berlangsung sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan meskipun masih ditemukan beberapa keterbatasan dalam praktik pelaksanaannya. Aspek komunikasi terlaksana melalui penyampaian informasi dan pendampingan kepada petani secara berkelanjutan. Aspek sumber daya didukung oleh keberadaan penyuluh dan sarana penyuluhan, meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah penyuluh dan fasilitas pendukung. Aspek disposisi menunjukkan komitmen yang baik dari pelaksana kebijakan, sedangkan aspek struktur birokrasi didukung oleh pedoman pelaksanaan dan koordinasi antar lembaga. Kendala implementasi meliputi kompleksitas permasalahan pertanian, keterbatasan sumber daya, perubahan regulasi, serta kondisi sosial ekonomi petani yang memengaruhi penerapan inovasi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas penyuluh, peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan dukungan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penyuluhan pertanian.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penyuluhan Pertanian, Kelompok Tani.

JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2025.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Nedhi Hermansya *

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Indonesia

Email address: nedihermansya@gmail.com

1Pendahuluan

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks administrasi publik, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh efektivitas implementasi kebijakan yang dijalankan oleh organisasi pelaksana di tingkat daerah. Salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk memperkuat kapasitas petani adalah penyuluhan pertanian. Penyuluhan berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi, teknologi, dan inovasi pertanian sekaligus sebagai proses pemberdayaan yang mendorong perubahan perilaku petani menuju sistem usaha tani yang lebih produktif dan berkelanjutan (Mayrowani, 2016).

Kegiatan penyuluhan pertanian berperan sebagai sarana pembelajaran bagi petani untuk memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan teknis, serta memperkuat kapasitas dalam mengelola usaha tani secara lebih produktif. Melalui kegiatan penyuluhan, petani diharapkan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, perubahan lingkungan usaha, serta dinamika pasar pertanian yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, penyuluhan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga berperan dalam mempercepat adopsi inovasi yang

mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani (Sunartomo, 2016). Bahkan, penyuluhan telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian swasembada pangan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian di tingkat petani (Indraningsih, 2015).

Meskipun memiliki peran yang penting, implementasi kebijakan penyuluhan pertanian masih menghadapi berbagai tantangan. Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sistem penyuluhan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Namun demikian, perubahan kelembagaan yang terjadi dalam era desentralisasi juga menimbulkan persoalan koordinasi dan efektivitas organisasi penyuluhan. Penelitian (Alim et al., 2008) menunjukkan bahwa perubahan struktur kelembagaan penyuluhan sebagai konsekuensi otonomi daerah berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan yang menjalankannya.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program penyuluhan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kelompok tani. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi petani, keterbatasan sumber daya, serta keberlanjutan program yang belum optimal (Nursinar et al., 2025). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penyuluhan sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan di lapangan, termasuk kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola sumber daya, membangun komunikasi, dan melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah yang terus berupaya memperkuat pembangunan sektor pertanian melalui berbagai program penyuluhan. Pemerintah daerah telah menyusun program penyuluhan pertanian yang diarahkan untuk mendukung pengembangan pertanian modern melalui pemanfaatan teknologi, digitalisasi pertanian, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan agrowisata sebagai potensi ekonomi daerah (Mediasinardunia.com, 2025). Pelaksanaan program tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, penyuluh pertanian, kelompok tani, hingga lembaga pendukung lainnya.

Dari sisi sumber daya, Kabupaten Rejang Lebong memiliki 94 tenaga penyuluh pertanian yang terdiri atas penyuluh PNS, PPPK, tenaga harian lepas daerah, dan penyuluh swadaya. Keberadaan penyuluh swadaya menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penyuluhan pertanian. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas implementasi kebijakan karena masih terdapat tantangan yang berkaitan dengan jumlah penyuluh, ketersediaan sarana pendukung, koordinasi kelembagaan, serta kemampuan petani dalam mengadopsi inovasi pertanian.

Berdasarkan temuan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar kajian penyuluhan pertanian lebih menitikberatkan pada dampak program terhadap peningkatan produktivitas maupun pemberdayaan petani. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan penyuluhan pertanian dari perspektif administrasi publik, terutama yang mengkaji aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam konteks pemerintah daerah, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong juga belum banyak ditemukan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis yang tidak hanya melihat temuan atau dampak penyuluhan, tetapi juga mengkaji proses implementasi kebijakan yang dijalankan oleh organisasi pelaksana. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan (Edwards III, 1980) yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penyuluhan pertanian. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala implementasi dengan menggunakan perspektif Mazmanian dan Sabatier sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberterimaan implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di tingkat daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyuluhan pertanian serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kabupaten Rejang Lebong.

2Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena implementasi kebijakan dalam konteks nyata serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan penyuluhan pertanian pada tingkat daerah. Menurut (Yin, 2018), studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk menelaah fenomena kontemporer dalam

konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan secara tegas. Sementara itu, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi yang diperoleh dari kondisi alamiah penelitian (Moleong, 2007).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan fokus pada Dinas Pertanian dan Perikanan serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah ini memiliki aktivitas penyuluhan pertanian yang cukup aktif dan relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan penyuluhan pertanian. Pengumpulan data dilakukan pada periode Maret hingga Mei 2026.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan mengacu pada pertimbangan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman terhadap pelaksanaan kebijakan penyuluhan pertanian (Sugiyono, 2017). Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri atas Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan Ketua Kelompok Tani.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan penyuluhan pertanian serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas penyuluhan dan kondisi lapangan, sedangkan dokumentasi dilakukan melalui penelaahan dokumen, laporan, dan data pendukung yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016). Reduksi data dilakukan melalui proses seleksi dan penyederhanaan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan interpretasi, kemudian ditarik kesimpulan mengacu pada pola, hubungan, dan makna yang ditemukan selama penelitian.

Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, menggunakan beragam teknik pengumpulan data, serta melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda guna memperoleh tingkat kepercayaan data yang lebih tinggi (Moleong, 2007).

3 Temuan Penelitian dan Pembahasan

Temuan Penelitian

A. Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Rejang Lebong

1. Komunikasi

Data lapangan memperlihatkan bahwa proses komunikasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran berlangsung secara aktif melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Penyampaian informasi dilakukan melalui rapat koordinasi, pertemuan kelompok tani, kegiatan penyuluhan, sekolah lapang, serta pendampingan langsung oleh penyuluh pertanian. Informasi yang diberikan meliputi program pembangunan pertanian, teknik budidaya, pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta berbagai inovasi yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Selain melalui kegiatan formal, komunikasi juga dilakukan secara langsung antara penyuluh dan petani ketika menghadapi permasalahan usaha tani di lapangan.

Mengacu pada perspektif Edwards III (1980), komunikasi yang efektif ditandai oleh kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada kelompok sasaran. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa informasi kebijakan telah disampaikan secara jelas dan berkelanjutan melalui program penyuluhan serta jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Keberadaan penyuluh pertanian sebagai penghubung antara pemerintah dan petani turut mendukung kelancaran penyampaian informasi sehingga tujuan kebijakan dapat dipahami oleh kelompok tani.

Meskipun demikian, efektivitas komunikasi masih menghadapi kendala pada beberapa wilayah binaan yang memiliki cakupan kelompok tani cukup luas. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas komunikasi belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan frekuensi pendampingan dan optimalisasi peran penyuluh agar penyampaian informasi dapat menjangkau seluruh kelompok tani secara lebih efektif.

2. Sumber Daya

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong secara umum telah tersedia dan mendukung pelaksanaan program penyuluhan. Dari aspek sumber daya manusia, penyuluh pertanian yang bertugas pada Dinas Pertanian dan Perikanan serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memiliki kompetensi yang cukup baik karena didukung oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pertanian. Namun demikian, jumlah penyuluh yang tersedia masih belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah kerja, jumlah desa binaan, dan kelompok tani yang harus didampingi. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa penyuluh harus melaksanakan pendampingan pada lebih dari satu wilayah binaan sehingga intensitas pelayanan kepada petani belum dapat diterapkan secara optimal.

Selain sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) telah memiliki fasilitas dasar seperti ruang kerja, ruang pertemuan, perangkat administrasi, dan media penyuluhan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Keberadaan fasilitas tersebut membantu penyuluh dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan penyebaran informasi kepada petani. Meskipun demikian, masih ditemukan keterbatasan sarana pendukung tertentu yang berpengaruh terhadap mobilitas penyuluh dan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Menurut (Edwards III, 1980), sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan keberterimaan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan ketersediaan personel, fasilitas, informasi, dan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Mengacu pada temuan penelitian, aspek sumber daya telah mendukung implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong, terutama dari sisi kompetensi penyuluh dan ketersediaan fasilitas dasar penyuluhan. Akan tetapi, keterbatasan jumlah penyuluh dan belum optimalnya sarana pendukung masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyuluhan pertanian secara lebih merata dan berkelanjutan.

3. Disposisi

Sikap pelaksana kebijakan mencerminkan adanya komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pendampingan kepada petani sesuai dengan tugas yang diemban di Kabupaten Rejang Lebong telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya komitmen dan tanggung jawab para pelaksana kebijakan, mulai dari Dinas Pertanian dan Perikanan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), hingga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada petani. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, kunjungan lapangan, serta pemberian konsultasi kepada petani dalam mengatasi berbagai permasalahan usaha tani. Selain itu, para pelaksana juga memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap tujuan dan arah kebijakan penyuluhan pertanian sehingga kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada programa penyuluhan dan pedoman kerja yang telah ditetapkan.

Menurut (Edwards III, 1980), disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa sikap positif dan pemahaman yang baik terhadap kebijakan menjadi faktor pendukung dalam implementasi penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong. Kondisi tersebut memungkinkan pelaksana menjalankan tugas secara konsisten dan mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas dan dukungan terhadap penyuluh tetap diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

4. Struktur Birokrasi

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong telah mendukung pelaksanaan program penyuluhan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pedoman kerja, programa penyuluhan, jadwal kegiatan, serta pembagian tugas yang jelas antara Dinas Pertanian dan Perikanan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Selain itu, koordinasi antar lembaga juga telah berjalan melalui rapat koordinasi, penyusunan programa penyuluhan, serta komunikasi yang diterapkan secara berjenjang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan di lapangan. Kejelasan tugas dan mekanisme kerja tersebut membantu pelaksana dalam menjalankan kegiatan penyuluhan secara lebih terarah dan sistematis.

Menurut (Edwards III, 1980), struktur birokrasi yang efektif ditandai dengan adanya prosedur kerja yang jelas dan koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keberadaan standar operasional, programa penyuluhan, dan koordinasi antar lembaga telah

mendukung implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong. Meskipun demikian, peningkatan sinergi dan intensitas koordinasi antar lembaga masih diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif serta mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi petani di lapangan.

B. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Rejang Lebong

1. Karakteristik Masalah

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa karakteristik masalah dalam implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong tergolong cukup kompleks. Kompleksitas tersebut terlihat dari beragamnya permasalahan yang dihadapi petani, baik yang berkaitan dengan aspek teknis maupun nonteknis. Pada aspek teknis, masih ditemukan rendahnya adopsi teknologi pertanian, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani, alih fungsi lahan pertanian, serta belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan. Sementara itu, pada aspek nonteknis terdapat berbagai kendala yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia penyuluh, dukungan sarana dan prasarana, kelembagaan penyuluhan, serta akses petani terhadap teknologi dan informasi pertanian.

Menurut (Daniel A. Mazmanian, 1983), karakteristik masalah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberterimaan implementasi kebijakan karena menentukan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam mencapai tujuan kebijakan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya dihadapkan pada permasalahan perilaku petani dalam menerima inovasi, tetapi juga berbagai kendala struktural yang memengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi melalui penguatan kapasitas petani, peningkatan kualitas penyuluhan, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan agar berbagai permasalahan tersebut dapat diatasi secara efektif.

2. Kemampuan Kebijakan dalam Menstrukturkan Implementasi

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong telah memiliki dasar regulasi, program penyuluhan, serta petunjuk teknis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Keberadaan berbagai dokumen tersebut memberikan arah yang jelas bagi Dinas Pertanian dan Perikanan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap perubahan regulasi, sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan petani di lapangan.

Menurut (Daniel A. Mazmanian, 1983), kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, konsistensi aturan, serta kemampuan kebijakan dalam mengarahkan tindakan para pelaksana. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan penyuluhan pertanian telah memberikan pedoman yang cukup jelas dalam pelaksanaan program, namun efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan koordinasi, sosialisasi kebijakan, dan penyesuaian program dengan karakteristik wilayah. Dengan demikian, kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan implementasi telah mendukung pelaksanaan penyuluhan pertanian, meskipun masih diperlukan penyempurnaan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara lebih optimal.

3. Variabel Lingkungan

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa variabel lingkungan turut memengaruhi implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong. Dari aspek sosial, sebagian besar masyarakat mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan karena mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian dan tergabung dalam kelompok tani. Dukungan tersebut memudahkan penyuluh dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada petani. Namun demikian, dari aspek ekonomi masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan modal usaha, tingginya biaya produksi, dan fluktuasi harga komoditas pertanian yang memengaruhi kemampuan petani dalam menerapkan inovasi dan teknologi yang diperkenalkan melalui kegiatan penyuluhan.

Menurut (Daniel A. Mazmanian, 1983), kondisi sosial, ekonomi, dan dukungan lingkungan eksternal merupakan faktor yang dapat memengaruhi keberterimaan implementasi kebijakan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong memperoleh dukungan dari pemerintah daerah melalui program pembangunan pertanian, penyusunan program penyuluhan, dan kegiatan pemberdayaan petani. Meskipun demikian, kondisi ekonomi petani yang belum merata masih menjadi tantangan dalam penerapan temuan penyuluhan di lapangan. Oleh

karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, penyuluh, dan kelompok tani untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dalam mendukung keberterimaan implementasi kebijakan penyuluhan pertanian.

Pembahasan

A. Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Rejang Lebong

Implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III (1980) yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis yang diterapkan mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong telah mampu mendukung proses pembinaan petani melalui mekanisme komunikasi, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, dan koordinasi kelembagaan yang relatif efektif.

Dari aspek komunikasi, informasi kebijakan telah disampaikan secara cukup jelas dan berkelanjutan melalui rapat koordinasi, pertemuan kelompok tani, program penyuluhan, serta kegiatan pendampingan lapangan. Kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi tersebut memudahkan petani dalam memahami berbagai program dan inovasi pertanian yang diperkenalkan. Temuan ini sejalan dengan Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif merupakan faktor penting dalam keberterimaan implementasi kebijakan.

Pada aspek sumber daya, penyuluh pertanian yang bertugas memiliki kompetensi yang cukup baik dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Namun demikian, jumlah penyuluh yang tersedia masih belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah binaan dan jumlah kelompok tani yang harus didampingi. Selain itu, meskipun sarana dan prasarana penyuluhan telah tersedia, masih terdapat beberapa keterbatasan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan sumber daya masih menjadi faktor yang perlu diperkuat untuk mendukung implementasi kebijakan secara optimal.

Dari aspek disposisi, para pelaksana kebijakan mengindikasikan komitmen dan pemahaman yang baik terhadap tujuan serta pelaksanaan kebijakan penyuluhan pertanian. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan aktif penyuluh dalam kegiatan pembinaan, pendampingan, dan konsultasi kepada petani. Komitmen dan pemahaman yang baik tersebut menjadi modal penting dalam mendukung keberterimaan implementasi kebijakan.

Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan telah didukung oleh adanya pedoman kerja, program penyuluhan, serta koordinasi yang cukup baik antara Dinas Pertanian dan Perikanan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh pertanian lapangan, pemerintah desa, dan kelompok tani. Kejelasan prosedur kerja dan koordinasi antar lembaga membantu pelaksanaan kegiatan penyuluhan berjalan lebih terarah dan sistematis. Mengacu pada keempat indikator tersebut, implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong dapat dikategorikan telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek sumber daya dan peningkatan efektivitas koordinasi untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara lebih optimal.

B. Kendala Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Rejang Lebong

Meskipun implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong telah berjalan cukup baik, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Mengacu pada temuan penelitian, kendala tersebut berkaitan dengan kompleksitas permasalahan pertanian yang dihadapi petani maupun penyuluh di lapangan. Permasalahan yang ditemukan tidak hanya terbatas pada aspek teknis budidaya, tetapi juga mencakup rendahnya adopsi teknologi pertanian modern, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan sebagian petani, alih fungsi lahan pertanian, serta rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Selain itu, perbedaan karakteristik petani dan kondisi wilayah binaan menyebabkan kebutuhan penyuluhan pada setiap wilayah tidak selalu sama sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaannya.

Dari aspek kebijakan, implementasi penyuluhan pertanian telah didukung oleh berbagai regulasi, program penyuluhan, dan petunjuk teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, perubahan regulasi dan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat sering kali memerlukan penyesuaian pada tingkat daerah. Kondisi tersebut menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dari para pelaksana kebijakan agar program yang dijalankan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus mampu menjawab kebutuhan petani di lapangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan telah

memberikan arah pelaksanaan yang cukup jelas, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi daerah.

Selain faktor internal, implementasi kebijakan penyuluhan pertanian juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dari aspek sosial, masyarakat dan kelompok tani pada umumnya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Akan tetapi, dari aspek ekonomi masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan modal usaha, tingginya biaya produksi, dan fluktuasi harga komoditas pertanian yang mempengaruhi kemampuan petani dalam menerapkan inovasi yang diperoleh melalui kegiatan penyuluhan. Sementara itu, dukungan pemerintah daerah melalui program pembangunan pertanian dan kegiatan pemberdayaan petani menjadi faktor yang turut membantu pelaksanaan penyuluhan di lapangan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menjelaskan bahwa keberterimaan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik masalah, kemampuan kebijakan dalam mengarahkan pelaksanaan, serta kondisi lingkungan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas penyuluh, peningkatan dukungan sarana dan prasarana, serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, penyuluh, dan kelompok tani agar berbagai kendala tersebut dapat diminimalkan dan tujuan kebijakan penyuluhan pertanian dapat tercapai secara optimal.

4Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Mengacu pada temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh aspek komunikasi yang mampu mendukung penyampaian informasi kebijakan kepada petani secara jelas dan berkelanjutan, aspek sumber daya yang didukung oleh kompetensi penyuluh serta ketersediaan sarana pendukung penyuluhan, aspek disposisi yang tercermin dari komitmen dan pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan, serta aspek struktur birokrasi yang didukung oleh pedoman kerja dan koordinasi antar lembaga yang berjalan cukup baik. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi keterbatasan jumlah penyuluh dan sarana pendukung yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penyuluhan di lapangan.

Kendala implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan pertanian yang mencakup rendahnya adopsi teknologi, keterbatasan kapasitas sebagian petani, serta beragamnya karakteristik wilayah binaan. Selain itu, perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian di tingkat daerah serta kondisi sosial dan ekonomi petani, seperti keterbatasan modal usaha dan fluktuasi harga komoditas pertanian, turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penyuluhan. Oleh karena itu, keberterimaan implementasi kebijakan penyuluhan pertanian memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan, serta penguatan sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan kelompok tani.

Saran:

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Pertanian dan Perikanan perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluh pertanian serta memperkuat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penyuluhan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada petani. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan sosialisasi kebijakan, serta pengembangan program pemberdayaan petani yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penyuluhan pertanian serta mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

5 Daftar Pustaka

- Alim, S., Yunasaf, U., & Winaryanto, S. (2008). Implikasi Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Kegiatan Penyuluhan Peternakan di Kabupaten Sumedang (Kasus di Cabang Dinas Pertanian Tanjungsari Sumedang)
The Implication of Regional Autonomy Implementation To Agriculture Extension in Sumedang Di. *Jurnal Ilmu Ternak*, 8(1), 72–76.
- Daniel A. Mazmanian, P. A. S. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman, University of Minnesota.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Indraningsih, K. S. (2015). Implementation and Impacts of Agricultural Extension Law on Food Self-Sufficiency Achievement. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 13(2), 109–128.
- Mayrowani, H. (2016). Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Implementasi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 30(1), 31. <https://doi.org/10.21082/fae.v30n1.2012.31-47>
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nursinar, N., Nurdin, F., Megawati, M., & Astaman, P. (2025). Implementasi Program Penyuluhan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Batu Belerang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, 13(1), 50–60. <https://doi.org/10.33005/jimaemagri.v13i1.50>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. (p. 118).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis : pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sunartomo, A. F. (2016). Agricultural Extension Capacity in Efforts to Increase Agricultural Productivity in East Java. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 5(2), 126–136. <http://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th Edition)*. SAGE Publications.

